

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG

Oleh :

Hanny Purnamasari, M.A.P
hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id

Rachmat Ramdani, S.IP
Rahmatramdani014@gmail.com

ABSTRAK

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Manajemen Pemerintahan Desa di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti menggunakan teori manajemen pemerintahan dari Ndharu yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan Kepala Desa Lemahabang, Sekdes Desa Lemahabang, Kaur Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dusun dan dua orang masyarakat Desa Lemahabang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa di Desa Lemahabang dilihat dari perencanaan belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan desa, dalam pengorganisasian manajemen pembangunan desa masih belum efektif, hal ini terlihat dari sumber daya manusia aparatur pemerintah belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga pembagian kerja dalam pelaksanaan pembangunan belum berjalan dengan optimal, dalam penggerakan belum efektif karena belum adanya kejelasan tentang teknis pembangunan desa serta berapa lama pembangunan desa akan dilaksanakan dan dalam pengawasan juga masih belum efektif, hal ini terlihat dari belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan baik internal maupun eksternal sehingga hasil dari pembangunan desa belum dapat diketahui.

Kata Kunci : manajemen pemerintahan, pembangunan desa, Lemahabang

1. LATARBELAKANG PENELITIAN

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigmanbaru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.

Berdasarkan dari peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa dalam pasal 78 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan desa yaitu

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu dijelaskan bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan keadilan sosial.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program-program pembangunan desa yang kurang adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih mendominasi oleh pihak pemerintahan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini terjadi di Desa Lemahabang dalam perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pihak pemerintahan kurang adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Lemahabang masih rendahnya sumber daya manusia.

Pembangunan masyarakat desa adalah pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat dengan mendorong adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, keberhasilan dari pembangunan dapat dinilai dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan dalam masyarakat haruslah diterapkan sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga masyarakat menyadari betapa pentingnya suatu pembangunan yang ada di daerahnya. Birokrasi dalam hal ini pemerintah harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan pembangunan pada daerah masing-masing dan di sini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan iklim yang menunjang setiap pembangunan.

Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang dalam melaksanakan program pembangunan selama ini belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan latarbelakang diatas tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk lebih lanjut dan mendalami dalam penelitian ini yang berjudul "Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang".

1.1. Identifikasi Masalah

Program pembangunan di Desa Lemahabang kurang adanya keterlibatan dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

1. Pemerintah desa kurang memberikan informasi tentang program pembangunan terhadap masyarakat.
2. Pemerintah desa masih mendominasi dalam perencanaan pembangunan masyarakat desa.

1.2. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perencanaan dalam manajemen pembangunan Desa Lemahabang?
2. Bagaimana Pengorganisasian dalam manajemen pembangunan Desa Lemahabang?
3. Bagaimana penggunaan sumber-sumber daya dalam manajemen pembangunan Desa Lemahabang?
4. Bagaimana kontrol dalam manajemen pembangunan desa Lemahabang?

1.4 Tujuan Penelitian.

Sehubungan dengan latarbelakang penelitian dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan manajemen pemerintahan dalam pembangunan masyarakat di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja Bahasa Inggris “*to manage*” yang berarti mengatur. Selain itu, kata “*to manage*” mempunyai sinonim antara lain: mengurus, memeriksa/mengawasi, menuntun/mengemudikan. Dari definisi di atas peneliti melihat yang dimaksud dengan manajemen yaitu mengurus, memeriksa, mengawasi, pengendalian, mengemudi, membimbing. Secara *etimologis* Abdul Sani (1987:1), mengatakan bahwa manajemen berasal dari kata “*manage*” yang berarti mengemudikan, memerintah, memimpin, atau membimbing terhadap orang lain dalam upaya yang ingin dicapai.

Manajemen disebut sebagai kegiatan, maka pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*. Individu yang menangani tugas-tugas operasional seluruhnya bersifat *manajerial*, kemampuan manajerial harus sesuai dengan sifat-sifat manajemen sebagai suatu proses. Proses ini menjadi panduan dari kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh. Manajemen sebagai suatu proses sosial, artinya adanya proses hubungan anatar manajer dengan bawahan.

Penjelasan tersebut, istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang telah tersedia dalam organisasi dengan cara sebaik mungkin. Menurut Sarwoto (1991:47) mengatakan bahwa organisasi mengandung unsur sekelompok manusia, maka unsur terpenting dalam manajemen adalah kelompok manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat dari George R Terry (dalam Sukirno, 2008:8) yang menyatakan bahwa unsur dasar (*basic element*) yang merupakan sumber yang dapat digunakan (*available resources*) untuk mencapai tujuan dalam manajemen adalah *Men* (manusia), *Materials* (material), *Machins* (mesin-mesin), dan *Money* (uang).

2.2 Fungsi Manajemen

Pandangan-pandangan yang berbeda dari para ahli mengenai rumusan rumusan fungsi-fungsi manajemen, di sini penulis mengambil pandangan dari seorang ahli bernama George R. Terry (dalam Hasibuan, 2009:9) merumuskan fungsi-fungsi manajemen dengan singkatan POAC, yaitu : 1).Perencanaan (*Planning*), 2). Pengorganisasian (*Organizing*), 3). Penggerakan (*Actuating*), 4). Pengendalian/Pengawasan (*Controlling*). Terry (1968:15) mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ndaraha (2003:159) menyebutkan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
2. Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan output dan outcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/gerak,

penggerakan/penggunaan sumber-sumber supaya output dan outcome yang dihasilkan dinikmati konsumen sesuai dengan output outcome yang diharapkan

3. Siklus produk berawal dari konsumen dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada customer.

Dari pendapat ahli di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi manajemen merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun fungsi-fungsi manajemen secara umum terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau penggunaan sumber-sumber dan pengawasan kontrol.

1. Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi, serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan program dan tujuan organisasi.
3. Penggerakan/pengarahannya adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasikan tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena karyawan-karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita, dan lainnya.
4. Controlling bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Dengan demikian apa yang dilakukan staff dapat diarahkan kejalan yang tepat dengan maksud pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Inti dari controlling adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana.
- 5.

2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati". Dari uraian di atas, peneliti dapat melihat bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2.4 Pembangunan Desa

Banyak pendekatan pembangunan yang telah diterapkan, yakni dari pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan dasar hingga yang paling mutakhir yakni pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral (objek sekaligus subjek) pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini lebih menekankan pada pembangunan fisik, bukan pada pembangunan karakter masyarakat. Dengan demikian pendekatan pembangunan yang relevan adalah masyarakat mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, terdesentralisasi dan tepat sasaran.

Pembangunan desa memegang peranan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dengan kata lain, sesungguhnya makna pembangunan negara dan bangsa adalah pembangunan desa sebagai wajah yang nyata, bersifat lokalitas dan patut dikedepankan.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (*outsider stakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses.

Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development by Governments*). Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya.

Dapat dilihat bahwa konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan itu menjadi wahana proses belajar atau hanya sekedar sebuah rekayasa yang mana pemerintah menjadi pemain tunggal. Dengan demikian penekanan pada aspek “proses” memiliki arti penting. Proses belajar mengandung makna bahwa setiap kekurangan dan kelemahan yang muncul dalam proses pelaksanaan program pembangunan menjadi informasi yang penting dan untuk itu dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.

Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antara individu dengan latar atau fokus penelitiannya tidak diisolasi kedalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat dimana dia melakukan penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang merupakan penjelasan mengenai data selama penelitian di lapangan terhadap Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, diperoleh data dan informasi melalui wawancara mendalam terhadap informan yang ditemui dilapangan dan studi dokumentasi.

Wawancara mendalam yang bersumber dari konsep manajemen pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa lemahabang Kecamatan Lemahabang dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip serta data dan informasi lainnya yang ada di Kantor Desa Lemahabang dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa.

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dalam proses menyusun data, mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola atau kategori agar dapat ditafsirkan yang dilakukan melalui 3 macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus menerus. Kegiatan tersebut terdiri dari reduksi data dengan mengumpulkan informasi yang didapat dan menyederhanakan informasi, display data atau penyajian data dengan menyajikan berbagai informasi data yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian dari penelitian yang dilakukan, penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan dimaksud untuk mencari makna dan membuat kesimpulan.

4.1 Perencanaan dalam manajemen pemerintahan desa dalam pembangunan desa di Desa Lemahabang

Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan dalam pembangunan desa dengan menggunakan pendekatan bottom up yang dimulai dari mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan kebutuhan yang memang benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Lemahabang. Perencanaan pembangunan memang perlu mendapatkan dukungan dari partisipasi peran aktif masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan yang akan oleh pemerintah desa, tanpa adanya ikut sertaan masyarakat pemerintah sulit untuk mengetahui apa saja yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Oleh sebab itu, maka pembangunan yang direncanakan harus sesuai dengan kemauan masyarakat disamping dukungan dari partisipasi yang dimiliki masyarakat untuk menyukseskan setiap gerakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan masyarakat desa yang

dilaksanakan di Desa Lemahabang terdapat bentuk-bentuk partisipasi dari masyarakat yang memberikan masukan terkait perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kaur pembangunan Desa menyatakan dalam perencanaan pembangunan beliau menyatakan bahwa:

“Perencanaan dimulai dari awal tahun dilaksanakan yang disesuaikan dengan pengajuan dari setiap dusun-dusun yang mengajukan kebutuhan untuk satu tahun kedepan pembangunan, pengajuan tersebut dari masyarakat oleh kami pemerintah desa di input data-data atas pengajuan dari masyarakat yang diwakili oleh setiap dusun. Misalnya pembangunan atas pengajuan pembangunan infrastruktur jalan setelah data di input kami dari Desa melakukan survai lapangan atas pengajuan pembangunan infrastruktur tersebut”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)

Perencanaan pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik, melalui langkah awal perencanan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan masyarakat tentunya melalui pendekatan partisipasi dengan mendengarkan segala kebutuhan masyarakat sebagai acuan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa. Perencanaan pembangunan di desa melalui beberapa tahap, dari setiap tahapan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat sebagai objek pembangunan yang diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Lemahabang menyatakan bahwa:

“Perencanaan pembangunan di Desa tahapan pertama, dimulai dari Musrembang dusun mengidentifikasi setiap kebutuhan masyarakat di Desa Lemahabang ada empat dusun. Dari keempat dusun itu kami melaksanakan musrembang untuk menampung kebutuhan masyarakat untuk pembangunan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan maupun jangka panjang. Dilanjutkan dengan musrembang Desa menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan atas hasil dari musrembang dusun. Setelah itu musrembang kecamatan dari setiap musrembang desa disatukan untuk dibahas di musrembang kabupaten itulah tahapan perencanaan pembangunan di desa”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)

Selain dari tahapan-tahapan tersebut dalam perencanaan pembangunan masyarakat desa di Lemahabang juga harus diperhitungkan landasan peraturan yang mengatur dalam rencana pembangunan. Pemerintah desa Lemahabang sebagai pelaksanaan pembangunan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan berhubungan dengan program rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan di Desa Lemahabang, sebagaimana pernyataan dari Kepala Desa Lemahabang beliau menyatakan bahwa:

“Kami sebagai pelaksana pembangunan desa dari setiap tahapan-tahapan pembangunan mengacu pada peraturan yang ada seperti peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan dan undang-undang desa terbaru acuan kami dalam pelaksanaan pembangunan”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)

Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan perencanaan pembangunan itu benar-benar dapat mengakomodir setiap aspirasi masyarakat sebagai dari objek pembangunan berkaitan dengan perencanaan pembangunan dalam setiap keputusan pengambilan keputusan untuk dijadikan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil dari

pengamatan penelitian dan wawancara mendalam dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan masyarakat desa sudah berjalan dengan baik dengan adanya beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh Desa Lemahabang untuk mewadahi aspirasi masyarakat untuk pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Selain itu, pemerintah Desa Lemahabang dalam perencanaan pembangunan hanya sebagai fasilitator pengajuan-pengajuan dari masyarakat setelah itu pemerintah desa menentukan skala prioritas pembangunan. Perencanaan pembangunan masyarakat desa sudah memiliki acuan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, akan tetapi dalam perencanaannya belum melibatkan masyarakat. Selain itu pemerintah desa belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang rencana pembangunan yang ada di Desa Lemahabang sehingga perencanaan dalam manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa belum efektif.

4.2 Pengorganisasian dalam manajemen pemerintahan desa dalam pembangunan desa di Desa Lemahabang

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi, serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan program dan tujuan organisasi.

Tahapan pembangunan masyarakat desa Lemahabang tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah desa tetapi ada pembagian tugas dalam menentukan prioritas pembangunan. Pembagian tugas tersebut untuk mendata semua keperluan dan kebutuhan dari setiap masyarakat. Tanpa adanya pembagian tugas dalam pembangunan masyarakat desa di Desa Lemahabang tidak akan terlaksana efektif karena Desa Lemahabang keterbatasan dalam sumber daya manusia. Desa dalam mengakomodir aspirasi membagi tugas kepada setiap dusun untuk membuat musyawarah yang akan dihadiri oleh masyarakat dusun setempat untuk menentukan pembangunan di dusun tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaur pembangunan Lemahabang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembangunan membagi tugas, pemerintah desa di bantu oleh wakil wilayah dan ketua-ketua dusun yang membantu pelaksanaan pembangunan tanpa adanya pembagian tugas tidak akan semua terakomodir aspirasi. Saya koordinasi dengan sekretaris desa dan kepala desa untuk melaporkan tahapan pembangunan ”.
(Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)

Dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di Lemahabang membagi tugas dan dibantu oleh masyarakat sebagai pemantuan pelaksanaan dari pembangunan tersebut. Seperti perencanaan pembangunan infrastruktur tahapan pertama masyarakat yang terdiri dari wakil wilayah dan dusun mengukur berapa meter jalan yang akan diperbaiki setelah itu ditinjau oleh Desa dan dibantu LPM untuk melihat kondisi dilapangan yang diperbaiki melalui anggaran desa dengan di bantu oleh aparatur desa dan masyarakat dusun setempat.

Pengorganisasian dalam pembangunan Desa Lemahabang dibantu oleh masyarakat misalkan untuk pembangunan bidang kesehatan kami bekerjasama dengan ibu-ibu posyandu mendata apa saja yang dibutuhkan untuk di bantu oleh pemerintah desa seperti kebutuhan pembangunan fasilitas posyandu, kelengkapan sarana dan prasarana untuk posyandu dan lain-lain. Sama halnya di bidang pendidikan pun kami bekerjasama dengan masyarakat yang

mengelola seperti PAUD yang ada di Desa Lemahabang mendata semua kebutuhannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Lemahabang menyatakan bahwa:

“Selalu pembangunan di Desa Lemahabang sudah ditentukan presentasi-presentasi anggaran dari setiap bidangnya seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang pembangunan semuanya udah di plot dianggarkan melalui kebijakan APBDes tahapan mengumpulkan data yang akan di biaya oleh Desa bekerjasama dengan masyarakat yang diundang ke Kantor Desa”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)

Kelemahan dalam pengorganisasian pembangunan di Desa Lemahabang terletak di sumber daya manusianya sebagai pelaksana dari pembangunan masih rendah bisa dilihat berdasarkan dari komposisi pendidikan. Desa Lemahabang belum ideal dalam pembagian tugas sesuai dengan kemampuan keahlian di bidangnya hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dari minat masyarakat desa untuk menjadi aparatur desa. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan peneliti, menurut pandangan penelitian bahwa pengorganisasian pembangunan di Desa Lemahabang belum cukup berjalan dengan baik. Faktor penghambat dari pengorganisasian terletak dari sumber daya manusia yang akan melaksanakan dari pembangunan tersebut. Mekanisme pengorganisasian pembangunan Desa Lemahabang dengan mengundang masyarakat ke kantor desa untuk menyampaikan apa saja yang mereka butuhkan yang tertampung dalam draf musrembang dusun.

4.3 Pergerakan dalam manajemen pemerintahan desa dalam pembangunan desa di Desa Lemahabang

Pengorganisasian menurut Terry dalam Syamsir Torang (2013:171), Actuating (penggerakan) meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan perintah. Kepemimpinan yakni gaya memimpin dari sang pemimpin dalam mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi agar mengarah pada pencapaian tujuan program dan organisasi. Sedangkan koordinasi yakni suatu aktivitas membawa orang-orang yang terlibat organisasi ke dalam suasana kerjasama yang harmonis.

Kepemimpinan merupakan bagian terpenting dalam mencapainya sebuah tujuan dari suatu organisasi. Dalam hal ini kepemimpinan dalam pembangunan masyarakat desa lemahabang untuk mengoptimalisasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa lemahabang baik sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk dijadikan pembangunan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan di desa lemahabang yang menjadi unggulan masih terfokus pada pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan di setiap dusun-dusun. Dalam kepemimpinan kepala desa saat ini memiliki keinginan untuk menyelesaikan kepemimpinannya fokus pada pembangunan merata infrastruktur jalan dari setiap dusunnya. Kepemimpinan mengoptimalkan semua para aparatur desa untuk mampu menggerakan pembangunan infrastruktur jalan dengan bekerjasama dengan masyarakat yang akan diperbaiki infrastruktur jalannya. Sebagaimana pernyataan dari kaur pembangunan menanggapi tentang kepemimpinan Kepala Desa Lemahabang mengatakan bahwa:

“Bukannya saya membaguskan kepala desa yah.. emang beliau pro aktif kalau dibandingkan dengan kepala desa yang lain. Pimpinan proaktif pelaksanaan pembangunan bahkan beliau sendiri terjun kelapangan untuk mendampingi proses pengukuran jalan yang akan diperbaiki tidak hanya menyerahkan kepada kami sebagai bawahan beliau ”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)

Dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan tidak lepas dari pengaruh kepemimpinan yang mengerakan aparat pemerintah maupun masyarakatnya. Maka keberhasilan dari pembangunan masyarakat desa bukan saja diukur dari segi keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan atau penyelenggaraan program pembangunan masyarakat tetapi bagaimana seorang pemimpin mampu menumbuh kembangkan partisipasi baik berupa dukungan penuh dari masyarakat maupun sumbangan-sumbangan lainnya yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk menyukseskan pembangunan di desa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh masyarakat desa menyatakan bahwa :

“Bentuk partisipasi masyarakat sudah tinggi bisa dilihat dari musrembang dusun banyak warga yang ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan, waktu pelaksanaan musrembang banyak yang kasih bantuan masukan untuk pembangunan di desa kebanyakan dari mereka ingin pembangunan infrastruktur jalan yang dirasakan masih banyak yang rusak jalan-jalan ke dusun ”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)

Selanjutnya di sampaikan oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lemahabang dalam menanggapi gaya kepemimpinan Kepala Desa Lemahabang beliau mengatakan bahwa:

“Yang saya rasakan kepala desa ketika memperbaiki jalan di dusun krajan beliau langsung mendampingi pengukuran bahkan beliau berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk mengupayakan agar di dusun krajan bisa masuknya mobil sekarang di dusun krajan bisa masuk mobil dan jalan udah diperbaiki ”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan menunjukan bahwa pergerakan dalam manajemen merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai dari suatu tujuan. Dalam hal ini pergerakan dalam pembangunan masyarakat desa di Desa Lemahabang belum berjalan efektif. Jika dilihat dari gaya kepemimpinan Kepala Desa yang dapat bekerja secara maksimal dalam mengoptimalkan sumber daya manusia baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi belum ada kejelasan mengenai siapa pelaksana pembangunan desa, berapa lama proses pembangunannya dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pembangunan.

4.4 Pengawasan dalam manajemen pemerintahan desa dalam pembangunan desa di Desa Lemahabang

Menurut Terry dalam Syamsir Torang (2013:177) pengawasan sebagai bagian dari pengendalian akan mencatat perkembangan organisasi kearah tujuan yang diharapkan dan memungkinkan pemimpin mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat dengan menentukan dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan diharapkan.

Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan secara internal organisasi dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kedua lembaga tersebut yang mengawasi setiap pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa lemahabang. Sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat itu sendiri yang dapat mengawasi pelaksanaan dari pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Lemahabang pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa menyatakan bahwa:

“Kepala desa selalu memberikan arahan ke semua aparaturnya agar pelaksanaan pembangunan agar berjalan efektif karena desa saat ini banyak yang mengawasi maknanya pimpinan selalu memberikan arahan agar program berjalan efektif. Nah yang sering menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan desa ketika turun semua program pembangunan di setiap desa kita berebut untuk dapat bahan material untuk pembangunan karena turunnya program pembangunan di kabupaten berbarengan sedangkan di desa masih fokus utama pembangunan fisik”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)

Kepala desa sangat menekankan kerjasama antar aparaturnya agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif. Di Karawang saat ini sudah banyak kepala desa yang terjerat kasus korupsi maupun penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa. Di desa Lemahabang selama ini belum ada teguran dari pihak pengawasan terhadap pelaksanaan dari pembangunan desa berjalan sesuai dengan perencanaan belum ada teguran dari LPM maupun BPD terkait dengan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh Desa beliau menyatakan bahwa:

“Masyarakat selalu menganggap bahwa desa itu banyak uang dari bantuan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dan bantuan-bantuan lainnya, sedangkan kita sebagai pelaksanaan pembangunan bahwa anggaran yang ada di desa semua dialokasikan untuk pembangunan fisik 70% untuk pembangunan fisik sedangkan sisanya pembangunan non fisik. Desa pun dalam pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari acuan aturan-aturan yang mengikat menjadi landasan pelaksanaan”. (Kantor Desa Lemahabang, 6 September 2017)

Dalam pelaksanaan pembangunan desa yang banyak teguran dari pihak pengawasan pembangunan ekonomi simpan pinjam yang selalu menjadi sorotan oleh pihak pengawasan baik LPM maupun BPD program simpan pinjam. Karena simpan pinjam tersebut sering terjadinya tumpang tindih aturan selain itu masyarakat selalu menganggap bantuan dari pemerintah tidak perlu dikembalikan mereka menganggap bantuan modal tanpa harus memikirkan untuk mengembalikan uang tersebut. Sedangkan program simpan pinjam itu sebagai upaya pemerintah melakukan pemberdayaan untuk masyarakat agar dapat kemandirian dalam bidang ekonomi. Desa Lemahabang untuk beberapa tahun terakhir tidak ada program bidang ekonomi simpan pinjam akan mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya sedangkan aparaturnya desa bekerja selalu diawasi oleh masyarakat secara langsung maupun pihak kelembagaan BPD dan LPM.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, pengawasan dalam pembangunan merupakan hal yang terpenting dari manajemen pembangunan karena tanpa adanya pengawasan maka pelaksanaan pembangunan akan banyak terjadinya penyimpangan. Dalam hal ini pengawasan dalam pembangunan masyarakat Desa Lemahabang belum efektif. Pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di Lemahabang untuk pembangunan sudah berjalan di semua dusun, akan tetapi belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan baik internal maupun eksternal sehingga hasil dari pembangunan desa belum dapat diketahui apakah masyarakat dapat menikmati hasilnya atau tidak.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam pembangunan masyarakat Desa Lemahabang belum efektif. Hal ini terlihat dari Perencanaan pembangunan masyarakat desa sudah memiliki acuan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, akan tetapi dalam perencanaannya belum melibatkan masyarakat. Selain itu pemerintah desa belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang rencana pembangunan yang ada di Desa Lemahabang sehingga perencanaan dalam manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa belum efektif.
2. Pengorganisasian dalam pembangunan masyarakat Desa Lemahabang belum begitu berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kelemahan pengorganisasian terletak dari sumber daya manusia aparatur pemerintah belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga pembagian kerja dalam pelaksanaan pembangunan belum berjalan dengan optimal.
3. Pengerakan dalam pembangunan masyarakat Desa Lemahabang belum berjalan efektif. Jika dilihat dari gaya kepemimpinan Kepala Desa yang dapat bekerja secara maksimal dalam mengoptimalkan sumber daya manusia baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi belum ada kejelasan mengenai siapa pelaksana pembangunan desa, berapa lama proses pembangunannya dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pembangunan.
4. Pengawasan dalam pembangunan masyarakat Desa Lemahabang belum efektif. Pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di Lemahabang untuk pembangunan sudah berjalan di semua dusun, akan tetapi belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan baik internal maupun eksternal sehingga hasil dari pembangunan desa belum dapat diketahui apakah masyarakat dapat menikmati hasilnya atau tidak.

5.2 Saran

1. Kepala Desa dalam menjalankan program pembangunan harus melibatkan masyarakat agar tercipta suatu hubungan dan kinerja yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, disamping itu juga akan membuat masyarakat merasa bertanggungjawab atas pembangunan tersebut serta akan memelihara akan hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya.
2. Kepala Desa harus mengirimkan stafnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan agar dapat menunjang kemampuan staf desa dalam melaksanakan pembangunan.
3. Kepala Desa harus terus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat desa agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dalam program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Creswell. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dessler, Gery. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat.

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara .

_____. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Manulang, M.1996. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Masry Simbolon Maringan. 2004. Dasar- dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Moelong. Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta : UGM Press.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu pemerintahan baru). Jakarta : Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga.

Sinabela, Poltak. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja Yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja. Jakarta : Bumi Aksara.

Syafie, Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sutoro, Eko dkk. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Tangkilisan, Hegel Nogi. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo

Waluyo. 2007. Manajemen Publik Konsep, Aplikasi Dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: CV. Mandar Maju